

## PERKARA PENTING PERUSAHAAN

- Hingga akhir tahun 2024, tidak ada Dewan Komisaris maupun Direksi yang terkena permasalahan hukum ketika sedang menjabat di Perseroan.
- Sepanjang tahun 2024, perusahaan beserta anak perusahaan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris tidak menerima sanksi administratif atau menghadapi permasalahan hukum dari Otoritas yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha.
- Sampai akhir tahun 2024, perusahaan tidak menghadapi permasalahan signifikan di luar aspek hukum yang melibatkan perusahaan, entitas anak, Dewan Komisaris, maupun Direksi.
- Pada posisi periode Juni 2025 dari 98 perkara yang berproses di Pengadilan, sebanyak 45 perkara (45%) berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[DOKUMEN SELENGKAPNYA →](#)

### Kasus Hukum PTPN III (Persero) Tahun 2024

#### Legal Cases Of PTPN III (Persero) In 2024

PTPN	Pertanahan Land			Non Pertanahan Non-Land			Total Perkara Total Case			
	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Jumlah Total
III	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1

#### Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Hingga akhir tahun 2024, tidak ada Dewan Komisaris maupun Direksi yang terkena permasalahan hukum ketika sedang menjabat di Perseroan.

#### Disclosure of Ongoing Legal Challenges Faced by the Current Board of Commissioners and Directors

Until the end of 2024, no members of the Board of Commissioners or the Board of Directors encountered legal issues while taking office at the Company.

#### Pengungkapan Permasalahan Hukum yang sedang Dihadapi Anak Perusahaan

#### Disclosure of Legal Issues Faced by Subsidiaries

### Kasus Hukum Anak Perusahaan PTPN III (Persero) Tahun 2024

#### Legal Cases of the Company's Subsidiaries in 2024

PTPN	Reg	Pertanahan Land			Non Pertanahan Non-Land			Total Perkara Total Case			
		Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Jumlah Total
IV (PalmCo)	1	1	1	-	-	-	1	1	-	2	
	2	5	2	-	2	-	7	2	-	9	
	3	-	-	-	3	-	3	-	-	3	
	4	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2
	5	2	-	-	1	-	-	3	-	-	3

PTPN	Reg	Pertanahan Land			Non Pertanahan Non-Land			Total Perkara Total Case			
		Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Jumlah Total
I (SupCo)	1	45	-	-	-	-	1	45	-	1	46
	2	11	1	-	-	-	-	11	1	-	12
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	3	-	-	1	-	2	4	-	2	6
	5	1	-	-	1	-	-	2	-	-	2
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	5	-	-	11	-	-	6	-	-	16
	8	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3
<b>SGN (SugarCo)</b>		1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<b>LPP</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KPBN</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RPN</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KINRA</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>77</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>97</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>105</b>

## Pengungkapan Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Sepanjang tahun 2024, Perseroan beserta anak perusahaan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris tidak menerima sanksi administratif atau menghadapi permasalahan hukum dari Otoritas yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha.

## Disclosure of Administrative Sanctions by Related Authorities

In 2024, neither the Company nor its subsidiaries, along with the Board of Directors and Board of Commissioners members, encountered administrative penalties or legal issues from authorities that might impact business continuity.

## Perkara Penting di Luar Aspek Hukum

Sampai akhir tahun 2024, Perseroan tidak menghadapi permasalahan signifikan di luar aspek hukum yang melibatkan perusahaan, entitas anak, Dewan Komisaris, maupun Direksi.

## Important Cases Outside of Legal Aspects

Up until the end of 2024, the Company did not encounter major issues beyond legal matters related to the company, its subsidiaries, the Board of Commissioners, or the Board of Directors.

## 1. LAPORAN MONITORING PERKARA HUKUM PTPN *GROUP* s.d JUNI 2025

Perkara hukum di PTPN III (Persero), PTPN I, PTPN IV, PT LPP Agro Nusantara (“LPP”), PT Riset Perkebunan Nusantara (“RPN”), PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (“KPBN”), PT Sinergi Gula Nusantara (“SGN”), PT Industri Nabati Lestari (“INL”) dan PT Kawasan Industri Nusantara (“KINRA”) (selanjutnya secara keseluruhan disebut “PTPN *Group*”) yang prosesnya masih berjalan di lembaga peradilan pada periode s.d Juni 2025 sebanyak 98 Perkara sehingga bila dibandingkan periode Mei 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Berdasarkan Bidang Perkara:

Periode	Perkara Pertanahan	Perkara Non Pertanahan	Jumlah Perkara
Mei 2025	76 (83%)	16 (17%)	92 (100%)
Juni 2025	83 (85%)	15 (15%)	98 (100%)
▲ ▼	▲ 7 (9%)	▼ 1 (6%)	▲ 6 (7%)

### B. Berdasarkan Jenis Perkara:

#### 1) Perkara Pertanahan

Periode	Perdata	TUN	Pidana	Jumlah	Keterangan
Mei 2025	74 (97%)	2 (3%)	-	76 (100%)	47 Perkara di PTPN I R1
Juni 2025	82 (99%)	1 (1%)	-	83 (100%)	50 Perkara di PTPN I R1
▲ ▼	▲ 8(11%)	▼ 1 (50%)	-	▲ 7 (9%)	▼ 3 (6%)

#### 2) Perkara Non Pertanahan

Periode	Perdata	PHI	Pidana	Niaga	Arbitrase	Jumlah	Ket
Mei 2025	11 (69%)	1 (6%)	4 (25%)	-	-	16 (100%)	-
Juni 2025	11 (73%)	1 (7%)	3 (20%)	-	-	15 (100%)	-
▲ ▼	-	-	▼ 1(25%)	-	-	▼ 1 (6%)	-

### C. Berdasarkan Tingkatan Peradilan:

Periode	Pertama	Banding	Kasasi	PK	Arbitrase	Jumlah
Mei 2025	37 (40%)	9 (10%)	31 (34%)	15 (16%)	-	92 (100%)
Juni 2025	42 (43%)	11 (11%)	30 (31%)	15 (15%)	-	98 (100%)
▲ ▼	▲ 5 (14%)	▲ 2 (22%)	▼ 1 (6%)	-	-	▲ 6 (6%)



Pada posisi periode Juni 2025 dari 98 perkara yang berproses di Pengadilan, sebanyak 45 perkara (45%) berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### D. Nilai Aset dan Potensi Kerugian

Aset tanah PTPN Group yang menjadi objek perkara di Lembaga Peradilan adalah seluas ±8.911,06 Ha, yang terdiri dari okupasi seluas ±5.723,44 Ha dan klaim kepemilikan seluas ±3.187,62 Ha) dengan nilai aset yang menjadi objek gugatan seluruhnya sebesar Rp923,24 Miliar, sedangkan potensi kerugian atas perkara non pertanahan sebesar Rp500,13 Miliar sehingga seluruh potensi kerugian yang dapat dialami PTPN Group sebesar Rp1,42 Triliun.

Adapun terdapat perubahan nilai potensi kerugian yang signifikan dikarenakan adanya perubahan perhitungan atas potensi kerugian untuk perkara pertanahan yang sebelumnya dihitung menggunakan nilai buku/revaluasi aset diubah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

#### E. Perkembangan Penanganan Perkara s.d Mei 2025

- 1) **Perkara Selesai**, pada periode s.d Juni 2025 terdapat pengurangan 46 (empat puluh enam) perkara hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ataupun yang selesai prosesnya di lembaga peradilan yang terbagi atas:
  - a.) Perkara Pertanahan berkurang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perkara pada periode Juni 2025 dengan rincian sebagai berikut:
    - Perkara menang = 16 (enam belas) perkara dengan potensi penyelamatan aset tanah total seluas 1.356,24 Ha atau senilai Rp438.232.962.254.
    - Perkara kalah = 8 (delapan) perkara kalah sehingga terdapat potensi kehilangan aset tanah seluas 29,84 Ha atau senilai Rp63.767.235.640
    - Perkara dicabut = 3 (tiga) Perkara
  - b.) Perkara Non Pertanahan berkurang sebanyak 20 (dua puluh) perkara pada periode Juni 2025 dengan dampak potensi kerugian yang dapat diselamatkan mencapai Rp359,99 Miliar dan untuk perkara yang kalah berdampak kepada perusahaan yang mewajibkan pembayaran tuntutan uang PHK sebesar Rp114,29 Juta.
- 2) **Perkara Baru**, pada periode s.d Juni 2025 terdapat penambahan 39 (tiga puluh sembilan) perkara hukum yang masuk pada proses peradilan yang terdiri atas perkara pertanahan sebanyak 30 (tiga puluh) perkara dan non pertanahan sebanyak 9 (sembilan) perkara. Dari 39 (tiga puluh sembilan) perkara tersebut, 4 (empat) perkara diantaranya merupakan perkara pidana.

